PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA
(Studi Empiris Pada Desa di Kabupaten Kepulaun Meranti)

Tusanti Igus Findayani[1)], Yesi Mutia Basri[2)], Arumega Zarefar[2)]
1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau
2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau
Email : Tusanti.igusfindayani@gmail.com

The effect of the application of the principles of good governance on the performance of the village government
(Empirical studies on village government in Kepulauan Meranti Regency)

ABSTRACT

This study aims to prove empirically the influence of the principles of good governance on the performance of the village government. The population of this study is the village government in the Kepulauan Meranti Regency. The research sample used purposive sampling, namely all villages in Tebing Tinggi District, Tebing Tinggi Barat and Rangsang Barat District of Meranti Islands, which amounted to 31 villages. Data was collected through surveys by distributing questionnaires, where the respondents were village heads, village secretaries, heads of financial affairs and 124 general affairs heads. The analytical method used in this study is multiple regression analysis. The analytical tool used is Statistical Product and Service Solution (SPSS) version 23.0. The variables used are transparency, accountability, community participation and justice as independent variables. While the performance of the village government as the dependent variable. The results of the study show that transparency, accountability, community participation and justice have a positive effect on the performance of the village government.

Keywords : Transparency, Accountability, Community Participation, Justice, Village Government Performance.

PENDAHULUAN

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Menurut Widjaja (2002:126) Kepala Desa/Marga berkedudukan sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintah Desa/Marga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa/Marga. Kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Di dalam pemerintah desa terdapat Kepala Desa dan Perangkat Desa. dalam mewujudkan sebuah desa yang baik maka diperlukan kinerja yang baik dari pemerinah desa.

Menurut Yabbar dan Hamzah (2015:17) Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal-usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa serta kemampuan dan potensi Desa. pembentukan desa

juga diprakarsai oleh : (a) Pemerintah atau (b) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pelaksanakan prinsip–prinsip *good governance* dalam pemerintahan desa di Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti juga kurang terlaksana. Pelaksanaan proyek pembangunan pintu air Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti terkesan dikerjakan asal jadi. Sesuai hasil pantauan baru di lapangan terlihat belum selesainya pengerjaan proyek pembangunan pintu air tersebut terlihat seperti pada pintu air dan penimbunan dari tanah. Seperti diketahui, proyek pembangunan pintu air tersebut dianggarkan sebesar Rp.284.000.000 dengan volume 16x5x5m. Sedanglan sumber dananya berasal dari Dana Desa Sesap. Informasinya dana untuk pembangunan pintu air itu sudah habis. Terkait tidak tuntasnya pembangunan pintu air ini, sejumah warga tepatan meminta pihak instansi terkait atau penegak hukum supaya mengusut dana desa selama dipimpin oleh Kades Desa Sesap tersebut. Dari masalah itu diduga bahwa Kades Sesap melakukan penyelewengan dana desa selama ini, seharusnya bentuk apapun pembangunan desa harus musyawarah, libatkan semua aparat desa dan tokoh masyarakat. Masyarakat juga berharap Kades seharusya terbuka dan transparan mengelola dana desa. Selain itu, pemerintah desa Sesap terkesan lambat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Masyarakat juga mempermasalahkan soal belum kunjung dilakukanya pemasangan lampu penerangan jalan, padalah setiap warga yang membayar tagihan rekening listrik perbulanya sudah dikenakan beban biaya penerangan jalan. Selanjutnya adalah masalah air bersih. Masyarakat juga menginginkan adanya layanan air bersih diwilayah itu, sebab selama ini masyarakat dalam mengkonsumsi air untuk mandi dan memasak masih mengandalkan air hujan yang ditampung dengan penampung yang kapasitasnya sangat terbatas.

Masyarakat dewasa ini menuntut akan terwujudnya *good government governance*. Di dalam pelaksanaannya *good governance* bukan hanya ditujukan pada pemerintah pusat namun pada pemerintah desa juga dituntut untuk melaksanakan *good governance* agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan sehat di setiap lini pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan keadilan terhadap kinerja pemerintah desa.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Lestiawan dan Jatmiko (2016), yang menjadi objeknya yaitu pemerintah daerah Kabupaten GunungKidul. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda. Sedangkan variabel keadilan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemda.

Pada penelitian Putra (2014) menyatakan bahwa prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja organisasi layanan publik.

Pada penelitian Raharja, dkk (2015) menyatkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

Pada penelitian Lestiawan dan Jatmiko (2016) menyatakan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda. Sedangkan variabel keadilan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemda.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Shinta, dkk (2017). Dalam penelitian ini menggunakan variabel Akuntabilitas dan Transparansi dalam penelitian tersebut untuk diteliti kembali, sebab masih ada ketidakkonsistenan hasil penelitian variabel tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel partisipasi masyarakat dan variabel keadilan dalam variabel independennya dan penelitian terdahulu dilakukan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan sedangkan penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang masih tergolong sangat muda yang masih berkembang di Provinsi Riau. Permasalahan terkait dengan kinerja menjadi sorotan publik. Alasan penulis memilih variabel tersebut untuk menguji kembali konsistensi hasil penelitian terdahulu.

Penelitian mengenai kinerja pemerintah memang telah banyak dilakukan, tetapi objeknya yaitu pemerintah daerah, sedangkan pada pemerintah desa masih sedikit yang meneliti, oleh karena itu peneliti ingin mengupas mengenai :

"PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA (Studi Empiris Pada Desa di Kabupaten Kepulaun Meranti)"

Berdasarkan uraian dari latar belakng diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah yaitu apakah prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan keadilan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa?

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Kinerja Pemerintah Desa

Menurut Moeheriono (2014:95) Pengertian kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegitan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolok ukur yang ditetapkan oleh organisasi. Oleh karena itu, jika tanpa tujuan dan target yang diterapkan dalam pengukuran, maka kinerja pada seseorang atau kinerja organisasi tidak mungkin dapat diketahui bila tidak ada tolok ukur keberhasilannya.

Menurut Yabbar dan Hamzah (2015:42) Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI). Ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Desa tidak hanya menyelenggarakan urusan Pemerintah Desa saja, tetapi juga menyelenggarakan urusan Pemerintah diatasnya yang berkaitan dengan Desa.

2. *Good Governance* Pemerintah Desa

Good governance merupakan proses yang menekankan pada bagaimana suatu organisasi dapat meningkatkan kinerjanya dan terciptanya masyarakat yang madani. *Good governance* diartikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. Apabila pelaksanaan *good governance* ditingkatkan maka otomatis dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Menurut Yabbar dan Hamzah (2015:42) Penyelenggara pemerintah desa adalah seluruh proses manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan organisasi, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan, dan pengembangannya.

3. Transparansi

Menurut Yabbar dan Hamzah (2015:42) Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Transparansi juga merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan.

4. Akuntabilitas

Menurut Yabbar dan Hamzah (2015:43) Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintaha Desa harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan atasan Kepala Desa, tetapi juga kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas harus berupa akuntabilitas vertikal dan horisontal.

Menurut Mardiasmo (2014:20) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi pertanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: (1) akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), dan (2) akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*).

5. Partisipasi Masyarakat

Menurut Yabbar dan Hamzah (2015:42)Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Menurut UNDP dalam Renyowijoyo (2013:12) *Participation* yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Menurut Adrinal (2007) dalam Putra (2014) partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan bahwa semua masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul, mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif

6. Keadilan

Menurut Yabbar dan Hamzah (2015:43) Keberagaman adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Menurut KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*), Keadilan mengandung unsur kejujuran sehingga dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara bertanggungjawab. Keadilan diperlukan untuk dapat mewujudkan pola kerja lembaga negara/daerah dan penyelenggaraan negara/daerah yang lebih adil dan bertanggungjawab. Keadilan juga diperlukan agar pemangku kepentingan dan masyarakat menjadi lebih mentaati hukum dan dihindari terjadinya benturan kepentingan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya lembaga negara/daerah dan penyelenggaraan negara/daerah harus senantiasa memperhatikan kepentingan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas keadilan.

Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

No	Penelitian	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Premananda dan Latrini (2017)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kota Denpasar	Independen -Akuntabilitas -Transparansi -Partisipasi Anggaran Dependen -Kinerja Anggaran	 -Berpengaruh -Berpengaruh -Berpengaruh
2	Lestiawan dan Jatmiko (2016)	*Key Success Factor Good Government Governance* Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah	Indepnden -Transparansi -Akuntabilitas -Partisipasi Masyarakat -Keadilan -Responsibilitas Dependen -Kinerja Pemerintah	 -Tidak Berpengaruh -Tidak Berpengaruh -Tidak Berpengaruh -Berpengaruh -Berpengaruh
3	Wiguna, dkk (2015)	Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng	Independen -Pengawasan Keuangan Daerah -Akuntabilitas -Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Dependen -Kinerja Pemerintah Daerah	 -Berpengaruh -Berpengaruh -Berpengaruh
4	Permana (2015)	Pengaruh Partisipasi Publik Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Di Kabupaten Pesisir Selatan)	Independen -Partisipasi Publik -Akuntabilitas Dependen -Kinerja Keuangan	 -Berpengaruh -Berpengaruh

Kerangka Pemikiran

1. **Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa**

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai suatu organisasi. Semakin transparan suatu organisasi kepada masyarakat, maka semakin baik pula kinerjanya. Semakin terbuka pemerintah desa terhadap masyarakat tentang penyelenggaraan kegiatan di desa maka masyarakat percaya dan tidak menduga hal-hal yang negatif terhadap pemerintah desa sehingga hal tersebut bisa meningkatkan kinerja pemerintah desa.

H1 : Transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.

2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Akuntabilitas merupakan elemen yang penting dan memjadi prinsip dalam rangka terwujudnya pemerintah yang baik (*good governance*). Dengan terwujudnya akuntabilitas diharapkan dapat menciptakan suatu kondisi dimana akutabilitas menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam mempertanggungjawabkan amanah yang diterima yang sesuai dengan prinsip demokrasi.

H2 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Prinsip partisipasi merupakan kunci dalam sebuah organisasi, baik swasta maupun publik. Partisipasi mengedepankan keterlibatan stakeholder dalam berbagai urusan organisasi, dalam solusi pemecahan masalah ataupun dalam hal lainnya yang bertujuan untuk memajukan kinerja organisasi. Itu berarti, semakin aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maka akan mendukung semakin suksesnya pelakasanaan otonomi pada suatu desa, dan ketika otonomi di suatu desa dapat tercapai maka hal itu akan mendorong pemerintah desa tersebut untuk mengupayakan kinerja yang lebih baik.

H3 : Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.

4. **Pengaruh Keadilan Terhadap Kinerja Pemerintah Desa**

Apabila prinsip keadilan diterapkan dengan baik oleh pemerintah, maka kepercayaan masyarakat akan lebih tinggi terhadap pemerintah sehingga akan menimbulkan kinerja pemerintah menjadi lebih baik (Pratolo, 2010) dalam Lestiawan dan Jatmiko (2016).

H4 : Keadilan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti yang berjumlah 101 Desa. Yang

menjadi sampel adalah Pemerintah Desa di Kecamatan Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat dan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti yang berjumlah 31 Desa. Peneliti memilih sampel tersebut karena untuk memperkecil populasi, menghemat tenaga, waktu dan biaya, serta karena desa di tiga kecamatan tersebut memiliki dana yang besar dan juga lokasinya terjangkau. Yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Umum.

B. Objek dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Desa di 3 Kecamatan yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu seluruh desa di Kecamatan Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat dan Rangsang Barat. Penelitian ini dilaksanakan setelah mengikuti ujian proposal. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian kurang lebih 3 bulan, dengan pertimbangan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Adapun sumber data dala penelitian ini yaitu data primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik (metode) pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu berbentuk kuisioner.

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penilitian ini variabel dependennya yaitu Kinerja Pemerintah Desa (Y) dan variabel independennya adalah Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Partisipasi Masyarakat (X3) dan Keadilan (X4).

F. Uji Instrumen Penelitian / Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Adalah kecermatan suatu item atau instrumen data dalam mengukur apa yang ingin diukur. Hal ini menunjukkan adanya dukungan item tersebut dalam mengungkapkan sesuatu yang ingin diungkapkan (Priyatno, 2012:110 dalam Fernandes, 2015).

2. Uji Reabilitas

Reabilitas adalah alat ukur untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji rabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan.

G. Uji Normalitas data

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribuis data normal atau mendekati normal.

H. Uji Asumsi Klasik

1. Autokorelasi

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk

mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, maka dapat melakukan pengujian *Durbin Watson* (DW) dengan ketentuan :

a. Jika angka DW di bawah -2, bearti terdapat autokorelasi positif.
b. Jika angka DW dari -2 sampai +2, bearti tidak terdapat autokorelasi.
c. Jika angka DW lebih dari +2, bearti terdapat autokorelasi negatif.

2. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Uji Multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelassi antar variabel bebas (independen).

3. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari nilai residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas (Priyatni, 2012;158 dalam Fernandes, 2015).

I. Model Analisis Data

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda (*Multiple Regression Analysis*). Analisis regresi linear berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen atau memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen.

Persamaan analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_{2\,+}\, b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja Pemerintah Desa
α = Konstanta
X1 = Transparansi
X2 = Akuntabilitas
X3 = Partisipasi Masyarakat
X4 = Keadilan
b(1,2,3,..) = Koefisien Regresi
e = Faktor Pengganggu (Error)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakter sampel dalam penelitian serta memberikan deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Kinerja Pemerintah Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Keadilan. Hasil uji statistik deskriptif disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Statitik Deskriptif Variabel Penelitian
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Pemerintah Desa	115	34,00	53,00	45,6435	2,81035
Transparansi	115	24,00	38,00	32,5826	2,22025
Akuntabilitas	115	31,00	45,00	37,7043	2,72085
Partisipasi Masyarakat	115	20,00	35,00	28,9913	2,41884
Keadilan	115	16,00	40,00	32,7217	2,79896
Valid N (listwise)	115				

Sumber : *Data Olahan, 2019*

B. Hasil Uji Kualitas Data

1. Hasil Uji Validitas

Dalam penelitian ini df = n-2 (115-2) = 113, sehingga didapat r tabel untuk df (113) = 0,183. Jadi dapat dikatakan bahwa variabel X1, X2, X3, X4 dan Y adalah valid.

2. Hasil Uji Reabilitas

suatu variabel atau konstruk dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* masing-masing variabel > 0,60. Dalam tabel 4.5 berikut ini disajikan hasil uji reabilitas.

Tabel 2
Hasil Uji Reabilitas Data

Variabel	*Cronbach's Alpha*	Keterangan
Kinerja Pemerintah Desa	0,780	Reliabel
Transparansi	0,751	Reliabel
Akuntabilitas	0,833	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	0,856	Reliabel
Keadilan	0,838	Reliabel

Sumber : *Data Olahan, 2019*

C. Hasil Uji Normalitas Data

Gambar 1
Normal Probability Standarized Residual

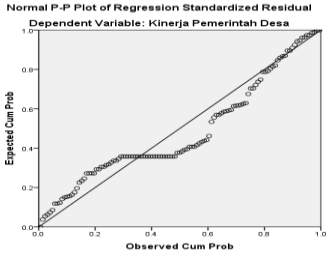

Sumber : *Data Olahan, 2019*

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis-garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

D. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 3
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	Durbin-Watson
1	.723[a]	1.556

Sumber : *Data Olahan, 2019*

Berdasarkan hasil diatas diketahui nilai *Durbin-Watson* terletak antara -2 dan +2 <1,553<+2, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi.

2. Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		Keputusan
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
Transparansi	.632	1.582	Terbebas dari Multikolinearitas
Akuntabilitas	.529	1.891	Terbebas dari Multikolinearitas
Partisipasi	.649	1.540	Terbebas dari Multikolinearitas
Keadilan	.898	1.114	Terbebas dari Multikolinearitas

Sumber : *Data Olahan, 2019*

Berdasarkan Tabel 4 hasil uji multikolinieritas di atas, hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,1. Hasil perhitungan

VIF juga menunjukkan hal sama, tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

E. Persamaan Regresi Linear Berganda

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	0.72	0.315		2.284	0.024		
	Transparansi	0.28	0.079	0.295	3.557	0.001	0.632	1.582
	Akuntabilitas	0.167	0.078	0.193	2.133	0.035	0.529	1.891
	PartisipasiMasyarakat	0.15	0.062	0.196	2.4	0.018	0.649	1.54
	Keadilan	0.24	0.051	0.328	4.71	0	0.898	1.114

Dependent Variable: KinerjaPemerintahDesa

Sumber : *Data Olahan, 2019*

Tabel diatas menunjukkan bahwa secara parsial nilai t_{hitung} Transparansi adalah sebesar 3.557,nilai t_{hitung} Akuntansi sebesar 2.133, nilai t_{hitung} Partisipasi Masyarakat sebesar 2.400 dan nilai t_{hitung} Keadilan sebesar 4.710. nilai t_{tabel} df (n – 1 – k = 115 – 1- 5 = 109), α 5% adalah 1,982.

F. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.723[a]	.522	.505	.18511	1.556

Sumber : *Data Olahan, 2019*

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* 0, 505, artinya varian pada kinerja pemerintah desa hanya 50,5% saja yang dapat dijelaskan oleh variabel Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Partisipasi Masyarakat (X3), Keadilan (X4), sedangkan sebesar 49,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa variabel Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Keadilan berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Keterbatasan Penelitian

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sudah dengan jumlah minimal sampel yang dibutuhkan, namun penelitian ini akan menghasilkan data yang lebih baik jika diajukan pada populasi dan sampel yang lebih besar.
2. Pengambilan data dalam penelitian ini hanya didasarkan kepada isian kuesioner sehingga dimungkinkan adanya unsur kurang obyektif di dalam pengisian kuesioner seperti adanya pengisian bersama dalam isian kuesioner tersebut. Selain itu dalam pengisian kuesioner diperoleh adanya sikap responden sendiri seperti tidak kepedulian dan tidak keseriusan dalam menjawab pernyataan yang ada dalam kuesioner tersebut.
3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel transparansi, akuntabilitas,

partisipasi masyarakat dan keadilan sehingga kemungkinan ada variabel lain lagi yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa untuk perlu diteliti.

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, agar lebih memperluas populasi dan sampel digunakan dalam penelitian, sehingga akan menghasilkan yang lebih baik.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dalam pengumpulan data sebaiknya dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.
3. Bagi peneliti selanjutnya, bisa menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Fernandes, Wanda. 2015. *Pengaruh Akuntabiltas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Pada Instansi Pemerintah Di Kabupaten Kampar*. Skripsi. Universitas Riau.

Lestiawan, Handi Yuniar dan Bambang Jatmiko. 2016. *Key Success Factor Good Government Governance Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah (Survey pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul).* Vol.5 No.1. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Mardiasmo. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:Andi.

Moeheriono. 2014. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Surabaya:pt Rajagrafindo.

Putra, Hendra G. 2014. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Studi Empiris Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat).* Universitas Negeri Padang.

Renyowijoyo, Muindro. 2013. *Akuntansi Sektor Publik; Organisasi Non Laba*. Edisi 3. Jakarta:Mitra Wicana Media.

Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa /Marga*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Yabbar, Rahmah dan Ardi Hamzah. 2015. *Tata Kelola Pemerintah Desa*. Surabaya:Pustaka.